

PENGARUH KOORDINASI PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN DI DESA DANASARI KECAMATAN CISAGA KABUPATEN CIAMIS

Eet Saeful Hidayat¹, Deliana Novia Rahmah²

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2}

E-mail :esapamungkas85@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan pembangunan di desa Danasari kecamatan Cisaga kabupaten Ciamis yang masih belum berjalan secara optimal terutama pemerataan pembangunan infrastruktur yang disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koordinasi Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Efektivitas Pembangunan. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif, dan teknik penarikan sampel menggunakan stratifikasi random sampling, jumlah sampel 40 responden. Selanjutnya untuk menguji besar pengaruh variabel koordinasi terhadap efektivitas pembangunan, maka dicari dengan menggunakan rumus product person moment dan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil analisis statistic, diketahui bahwa koordinasi terhadap memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pembangunan. Hasil penelitian menunjukan pada variabel koordinasi diperoleh skor rata-rata sebesar 73,15%. Efektivitas Pembangunan diperoleh skor rata-rata 74,46%. Dan pengaruh koordinasi antara Pemerintah Desa terhadap efektivitas Pembangunan di desa Danasari Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis diperoleh hasil sebesar 98.01% yang artinya pengaruhnya sangat tinggi dan 1.99% merupakan epsilon penelitian.

Kata Kunci : *Koordinasi, Efektivitas Pembangunan*

ABSTRACT

The implementation of development in Danasari village, Cisaga sub-district, Ciamis district, is still not running optimally, especially the equitable distribution of infrastructure development caused by weak coordination between the Village Government and the Village Consultative Body. The research objective was to determine how much influence the coordination of the Village Government with the Village Consultative Body on the Effectiveness of Development. The research method used is descriptive quantitative, and the sampling technique used stratified random sampling, the number of samples was 40 respondents. Furthermore, to test the influence of the coordination variable on the effectiveness of development, it is

necessary to look for the product person moment formula and the coefficient of determination. Based on the results of statistical analysis, it is known that coordination has a positive and significant effect on development effectiveness. The results of the research aimed at the coordination variable obtained an average score of 73.15%. Development effectiveness obtained an average score of 74.46%. And the effect of coordination between the village government on the effectiveness of development in the village of Danasari, Cisaga District, Ciamis Regency, the results were 98.01%, which means that the influence is very high and 1.99% is the research epsilon.

Keywords: *Coordination, Development Effectiveness*

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah proses, pembangunan merupakan aktivitas yang bersipat kontinyu guna menciptakan perubahan-perubahan dalam seluruh dimensi kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan standar hidup dan bagain dari proses adaftasi terhadap perubahan lingkungan yang juga terus menerus mengalami perubahan. Pembangunan juga dapat diartikan sebagai suatu proses peningkatan daya tahan dan kualitas kehidupan masyarakat sehingga memiliki *diferensial value* dari kondisi sebelumnya.

Pada dasarnya pembangunana merupakan program yang direncanakan oleh pemerintah secara struktural yang dilakukan secara terus menerus, baik dalam rencana jangka pendek ataupun dalam rencana jangka panjang, sebagaimana disampaikan Jokowi dalam salah satu pidato yang menyebut lima tahapan besar yang akan dilakukannya untuk membuat Indonesia lebih produktif, memiliki daya saing, dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan di dunia. Fokus

utamanya bergeser dari pembangunan infrastruktur fisik ke pembangunan sumber daya manusia untuk menghasilkan manusia Indonesia yang unggul dan maju sebagai implementasi dari amanat Undang-undang.

Namun pada tataran praktisnya pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien memang banyak menemui kendala dalam menjalankan proses pembangunan tersebut. Maka salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, dimana koordinasi merupakan salah satu dimensi yang urgent dalam tata kelola Pemerintahan. Koordinasi yang baik pada gilirannya nanti akan menciptakan sinergitas pemerintahan disemua lini. Sebab tanpa adanya koordinasi maka setiap unit akan berjalan parsial dan menonjolkan ego sentris melalui programnya. Kondisi tersebut, akan berdampak pada kemandegan dan kemunduran pencapaian tujuan pembangunan. Perspektif tersebut memberikan indikasi bahwa koordinasi harus mendapat perhatian serius dari

penyelenggaraan pemerintah, utamanya di daerah

Koordinasi merupakan salah satu cara untuk menyatukan usaha dari setiap pertanggung jawaban pelaksana proses pembangunan atau unit kerja di suatu daerah guna untuk mempermudah berjalannya proses pembangunan terutama pada pembangunan yang sesuai dengan tuntutan otonomi daerah yang berlaku. Dan untuk mencapai tujuan dari proses pelaksana pembangunan pada suatu daerah dapat tercapai. Sebagaimana di dalam PERMENDAGRI No. 114 tahun 2104 tentang Pembangunan Desa, disebutkan “bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa”. Koordinasi dimaksudkan agar tujuan pembangunan bisa tercapai secara efektif dan efisien sehingga dapat memenuhi ekspektasi publik .

Berdasarkan pengamatan awal peneliti menemukan berbagai fenomena tidak efektifnya pelaksanaan pembangunan dii Desa Danasari kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, yang ditunjukkan oleh gejala pemerataan pembangunan infrastruktur jalan ke semua wilayah desa, Pembangunan gedung Posyandu. dsb.

Fenomena tersebut menunjukkan keterbatasan kemampuan pemerintah

desa dalam mengoptimalkan fungsinya, Masalah-masalah yang ada dan terjadi disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang belum berjalan dengan baik, hal itu terlihat dari adanya indikator-indikator, Koordinasi tentang pembangunan hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Danasari Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Akibatnya para anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak mengetahui permasalahan yang sedang terjadi atau keputusan yang sudah disepakati. Sehingga para anggota Badan Permusyawaratan Desa mengambil keputusan masing-masing. Disamping itu rendahnya respon public sebagai akibat ketidak sesuai pelaksanaan pembangunan dengan aspirasi masyarakat.

Pernyataan masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dengan rumusan sebagai berikut, efektifitas pembangunan masih belum optimal. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, diduga antara lain lemahnya koordinasi pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa dan kegiatan – kegiatan pembangunan tidak berorientasi kepada aspirasi masyarakat. Sedangkan yang menjadi pertanyaan masalah (*problem question*) utama dalam penelitian ini adalah, ”Adakah pengaruh koordinasi pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa terhadap efektivitas pembangunan di desa

Danasari kecamatan Cisaga kabupaten Ciamis” ?.

KAJIAN PUSTAKA

Pembangunan yang terencana ini, merupakan langkah menuju ke arah masyarakat yang makmur dan taraf hidupnya lebih baik. Maka dari itu, pemerintah dituntut untuk terus merencanakan program pembangunan, mengaplikasikan rencana pembangunan, fokus, dan menjalankan pembangunan dengan baik. Pembangunan yang baik merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Adapun menurut Siagian (2007: 4) Pembangunan didefinisikan sebagai “rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*)”.

Adisasmita (1996 : 71) juga mengemukakan bahwa pembangunan mempunyai pengertian yang sangat luas, yaitu : Secara sederhana pembangunan itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Pembangunan dapat diartikan juga sebagai gagasan untuk mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan. Dimana gagasan tersebut lahir dalam bentuk usaha untuk mengarahkan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, serta pembangunan bangsa. Seperti yang telah diuraikan di atas, pembangunan merupakan perubahan menuju ke arah perbaikan.

Perubahan ke arah perbaikan itu sendiri memerlukan pengarahannya segala budi daya manusia untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Dengan sendirinya pembangunan merupakan proses penalaran dalam rangka menciptakan kebudayaan dan peradaban manusia.

Todaro (2000 : 78) mengemukakan bahwa :

Dalam konteks pembangunan nasional maupun daerah pembangunan yang dilakukan sebagai suatu pembangunan ekonomi, hal tersebut dapat dibenarkan karena pembangunan bukan hanya berarti penekanan pada akselerasi dan peningkatan dalam pertumbuhan perkapita sebagai indeks dari pembangunan, tetapi pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang meliputi reorganisasi pada pembaharuan seluruh sistem dan aktifitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Listyaningsih (2014: 18) mengartikan pembangunan sebagai berikut :

“Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju arah yang lebih baik.”

Tjokrowinoto (Suryono, 2004 : 21) yang menyimpulkan bahwa makna pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ke tataran kehidupan masyarakat yang lebih baik.
2. Pembangunan sebagai upaya manusia sadar, terencana dan melembaga.
3. Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*).
4. Pembangunan memperoleh sikap dan konsep transedental, sebagai *metadisiplinary phenomom*, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideology, *the ideology of developmentalism*.
5. Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai (*value loaded*). Menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa semakin meningkat.
6. Pembangunan menjadi *culture specific, situation specific* dan *time specific*.

Koordinasi dalam perencanaan pembangunan jalan mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan kerangka acuan bagi pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan, yang menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional bertujuan untuk : (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; (3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Koordinasi menurut Djamin (Hasibuan, 2011 : 86) diartikan sebagai 'suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.' Selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Siagian (2016 : 214) mengartikan koordinasi sebagai berikut:

Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebutuhan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin.

Begitu pula hasil penelitian Ritonga(2017), yang menemukan konsepsi Koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Perumyawaratan

Desa sangat diperlukan dalam suatu pemerintahan yang demokrasi khususnya di desa. Tanpa adanya koordinasi yang baik yang dijalankan kedua lembaga ini mustahil akan terwujudnya pembangunan di desa dan pelayanan masyarakat. Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta semua pihak yang ikut terlibat, maka dapat meminimalisir hambatan-hambatan dalam melaksanakan tujuan pembangunan yang hendak dicapai.

Sedarmayanti (2009 : 59) mengartikan bahwa “Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dicapai”. Sedangkan Priansa (2015 : 11-12) mengemukakan bahwa “Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Efektivitas berkaitan dengan sejauhmana organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas dan efektif menjadi hasil yang diharapkan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan. Oleh karena itu mekanisme yang harus dijalankan oleh aparat Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta masyarakat ialah dengan cara bertanggung jawab dalam pengelolaan pembangunan melalui koordinasi yang baik satu sama lainnya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu suatu metode yang menggambarkan kegiatan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yakni variabel bebas koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, dan variabel terikat efektifitas pembangunan.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, dan untuk mengukur Prinsip-Prinsip Koordinasi digunakan dimensi dan indikator-indikator yang dikemukakan Sugandha (Anggara dan Ii Sumantri 2016 : 215) yang meliputi :

1. Kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama.
2. Kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak.
3. Ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan.
4. Saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya pada saat tertentu, termasuk masalah yang dihadapi masing-masing.
5. Koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerjasama tersebut.

6. Informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerjasama dan memahami masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak.
7. Saling menghormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling membantu.

Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel bebas. Dan untuk mengukur efektivitas pembangunan digunakan dimensi dan indikator-indikator yang dikemukakan Makmur (2015 : 7 - 9) unsur-unsur yang dinilai guna mengetahui efektivitas dari suatu pembangunan, yang meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Ketepatan penentuan waktu.
2. Ketepatan perhitungan biaya.
3. Ketepatan dalam pengukuran.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan.
5. Ketepatan berpikir.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan.
8. Ketepatan-ketepatan sasaran.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Karang Taruna, LPM, dan tokoh masyarakat dan jumlah populasi sebanyak 68 orang dilanjutkan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin berjumlah 40 responden penelitian. Selanjutnya

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koordinasi terhadap efektivitas pembangunan, maka dicari dengan menggunakan Analisa korelasi (r) menggunakan rumus korelasi *Product Moment* dari Pearson dan rumus koefisien determinasi dari 32 butir item pertanyaan, Sedangkan untuk membuktikan hipotesis terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel koordinasi (X) terhadap efektivitas pembangunan (Y) digunakan rumus Uji T.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

H_0 : Tidak terdapat pengaruh koordinasi pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa terhadap efektivitas pembangunan di desa Danasari kecamatan Cisaga kabupaten Ciamis

H_1 : Terdapat pengaruh pengaruh koordinasi pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa terhadap efektivitas pembangunan di desa Danasari kecamatan Cisaga kabupaten Ciamis

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai pada variable koordinasi pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat dari rata-rata skor sebesar 146,3 berada pada kategori baik. Dengan persentase hasil penelitian adalah sebesar 73,15 % yang artinya koordinasi antara Pemerintah

Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa berjalan baik. Sehingga dari nilai tersebut diketahui bahwa koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa secara signifikan akan berdampak terhadap komunikasi organisasi, sebab ketika komunikasi organisasi sudah menunjukkan kinerja yang baik serta memiliki kemampuan yang merata dalam mengembangkan potensi – potensi internalnya maka dengan sendirinya akan terbangun pula efektivitas pembangunan di Desa.

Namun masih ada beberapa indikator-indikator yang belum optimal dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Indikator kesamaan persepsi mengenai tujuan yang harus dicapai dalam kegiatan pembangunan belum berjalan dengan baik. Hal ini diduga disebabkan oleh belum terjalin komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sehingga mengakibatkan pengambilan keputusan tentang pembangunan berdasarkan pemahaman dari masing-masing anggota yang terlibat.
2. Indikator memahami informasi yang diberikan dari berbagai pihak dan bekerjasama memonitor seluruh pelaksanaan pembangunan belum optimal dijalankan disebabkan oleh pengumpulan informasi yang disampaikan belum optimal sehingga pelaksanaan pembangunan terus mengalami perubahan dalam perencanaannya.

3. Indikator dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh semua pihak belum terlaksana dengan baik disebabkan karena evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa belum mendapatkan pemecahan masalah yang memuaskan sehingga dalam pelaksanaan pembangunan belum berjalan dengan baik.
4. Indikator saling membantu dalam pelaksanaan pembangunan belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh keselarasan antar anggota dalam melaksanakan kegiatan belum berjalan dengan baik.

Fenomena tersebut selaras dengan hasil penelitian Ritonga (2017) , Selama ini yang mempengaruhi terjalinnya koordinasi yang baik antar Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah tidak adanya komunikasi yang baik dan setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki pekerjaan yang lain di luar jam kerjanya sebagai Badan Permusyawaratan Desa... dengan tidak adanya koordinasi yang baik antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Batang Pane III menyebabkan pembangunan desa tidak berjalan dan banyak terjadi masalah.

2. Efektivitas Pembangunan di Desa Danasari Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai variable efektivitas Pembangunan di Desa Danasari

Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, pada umumnya telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi dengan jumlah rata-rata skor adalah sebesar 148,93 berada pada kategori baik, dengan persentase sebesar 74,46% dalam kategori baik yang artinya nilai tersebut memberikan dampak signifikan efektivitas Pembangunan di Desa sedangkan 25,54% merupakan variabel yang tidak diteliti dalam penelitian. Namun masih ada beberapa indikator yang dalam pelaksanaannya belum optimal yaitu :

1. Indikator pembangunan yang dilaksanakan harus bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh pengambilan beberapa peluang yang kemudian direalisasikan dalam bentuk pembangunan aspirasi dari masyarakat kurang diperhatikan oleh pemerintah desa sehingga hasil pembangunan kurang sesuai dengan aspirasi dari masyarakat.
2. Indikator sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan dari pembangunan yang dijalankan mengalami kendala dalam pembuatan rencana yaitu pembangunan hanya terpusat pada kemauan pemerintah desa saja.

Sependapat dengan hasil penelitian Azhari (2017) yang menyatakan bahwa proses menyatukan tindakan dalam menyelesaikan rencana pembangunan, dalam pelaksanaan atau penyelesaian suatu perencanaan pembangunan

Kepala Desa terlebih dahulu Berkoordinasi dengan Ketua BPD untuk mengadakan pertemuan atau rapat dengan LPM dan Masyarakat untuk membahas mengenai masalah pembangunan guna untuk kepentingan bersama dan demi kemajuan desa Sesayap, sebelum menjalankan pelaksanaan pembangunan ini pemerintah desa harus mempunyai kesepakatan bersama sehingga tidak adanya kesalah pahaman antara pemerintah desa dan masyarakat.

3. Pengaruh Koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan di Desa Danasari Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis

Selanjutnya untuk membuktikan hipotesis yaitu dengan menggunakan kaidah $t_{hitung} > t_{tabel}$. Maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1,30423 t_{hitung} sebesar 18,484 > dari t_{tabel} 1,30423 dapat disimpulkan hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Koordinasi Antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Efektivitas Pembangunan di Desa Danasari Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh besarnya hubungan antara variabel koordinasi dengan variabel efektivitas, dilihat dari *Koefisien Determinasi* (R^2_{YZX}) sebesar **0,99** yang termasuk pada kategori sangat kuat. Selanjutnya dari hasil uji determinasi diperoleh hasil 98,01% yang artinya pengaruhnya tinggi sekali, dan 1,99%

merupakan variabel yang tidak diteliti dalam penelitian.

Hasil pengujian sesuai dengan hasil penelitian oleh Pambudi, Hermi, dan Astri (2014), bahwa masih terdapat kekurangan dalam internal BPD yaitu kurangnya koordinasi antar anggota terutama dengan Ketua BPD. Ketua masih bersifat dominan dalam melaksanakan tugasnya sehingga anggota terkadang tidak dilibatkan ketika ada kegiatan. Selain itu terjadi kurang maksimalnya koordinasi antara BPD dengan LKMD dan Pemerintah Desa. Asprasi dari masyarakat juga belum sepenuhnya diserap dan di realisasikan oleh BPD.

Begitupula hasil penelitian Ritonga 2017, yang menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi 1. Kesatuan Tindakan yakni Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan

tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah dirncanakan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan :

Variabel Koordinasi Antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Danasari Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian memperoleh rata-rata skor sebesar 146,3 dan apabila dipersentasekan sebesar 73,15% berada pada kategori baik dan 26,85% merupakan dimensi yang tidak diteliti dalam penelitian. Efektivitas Pembangunan telah berjalan dengan baik dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang memperoleh rata-rata skor sebesar 148,93 dan apabila dipersentasekan sebesar 74,46 % berada pada kategori baik dan 25,54% merupakan dimensi lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

Untuk menguji pengaruh antara koordinasi terhadap efektifitas pembangunan menggunakan uji T untuk mengetahui seberapa kuat hubungan Koordinasi dengan Efektivitas Pembangunan dengan uji statistik menggunakan *korelasi product moment* dimana hasil perhitungan diperoleh nilai sebesar 0,99 yang menggambarkan

tingkat hubungan sangat kuat. Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Pembangunan diperoleh hasil koefisien determinasi sebesar 98.01%, perolehan nilai tersebut menunjukkan tingkat pengaruhnya adalah tinggi sekali dan 1,99% merupakan variabel yang tidak diteliti dalam penelitian. Selanjutnya untuk membuktikan hipotesis yaitu dengan menggunakan kaidah keputusan $t_{hitung} > t_{tabel}$. Maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1,30423 t_{hitung} sebesar 18,484 > dari t_{tabel} 1,30423, adalah non signifikan (Ho ditolak dan H_a diterima). Artinya “Terdapat Pengaruh yang signifikan antara Koordinasi Antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Efektivitas Pembangunan di Desa Danasari Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis”.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahajdo. (1996). *Pembangunan Pedesaan dan Perkantoran*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Pambudi, Hermini, Lusya Astrika (2014), Peran BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepala desa di desa Sarimulyo kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, Diakses 7 Januari 2021, <https://www.neliti.com/id/publications/105659/peran-bpd-dalam-melaksanakan-fungsi-pengawasan-kepala-desa-di-desa-sarimulyo-kec>
- Hasibuan, Malayu S.P . (2011). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi pembangunan (Pendekatan Konsep dan Implementasi)*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Makmur, (2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung. Riefka Aditama
- Nopes Scorpion dan Zaili Rusli (2014), Koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Diakses 7 Januari 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/31380-ID-koordinasi-antara-kepala-desa-dengan-badan-pemusyawaratan-desa-di-desa-pulau-kom.pdf>
- Priansa, Dono Juni Garnida dan Agus. (2015). *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung. CV Alfabeta.
- Rida Azari, (2017), Koordinasi kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan fisik di desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir kabupaten Tana Tidung, Diakses 7 Januari 2021

<https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2428>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.
114 tahun 2104 Tentang Pembangunan
Desa

Sahya Anggara dan II Sumantri. 2016.
*Administrasi Pembangunan
(Teori dan Praktik)*. Bandung.
Alfabeta.

Sedarmayanti,. (2009). *Sumber Daya
Manusia dan Produktivitas Kerja*.
Bandung : Penerbit Mandar Maju.

Siagian P Sondang. (2007).
*Administrasi Pembangunan
(Konsep, Dimensi, dan
Strateginya)*. Jakarta. Bumi
Aksara

Siagian P Sondang. (2016).
*Administrasi Pembangunan
(Konsep, Dimensi, dan
Strateginya)*. Jakarta. Bumi
Aksara

Soritua Ritonga (2017), Koordinasi
Antara Kepala Desa Dan Badan
Permusyawaratan Desa Di Desa
Batang Pane III Kecamatan
Padang Bolak Kabupaten Padang
Lawas Utara, Diakses 7 Januari
2021, [https://scholar.google.co.id/
citations?user=iY5CePAAAAAJ
&hl=id](https://scholar.google.co.id/citations?user=iY5CePAAAAAJ&hl=id)

Todaro, Michael.P.2000. *Pembangunan
Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta.
Erlangga

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa